

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM SMART CITY OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN CIREBON

Tri Priyono
NPP. 29.0705

*Asdaf Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: tripriyoonoo2701@gmail.com

ABSTRACT

Background of this research is based on the many shortcomings in the Smart City program such as the lack of facilities and infrastructure then the lack of human resources to operate the program and the lack of budget for implementing this program due to Covid-19. This study **purpose** to see how the evaluation of the Smart City program policies that have been carried out in the Regional Government of Cirebon Regency. The research design used is a qualitative descriptive research method with an inductive approach. The research **method** used is a qualitative method with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques used include data reduction, data presentation and conclusion drawing. **The results** show that the evaluation of the Smart City program policy has been carried out quite well, but in the evaluation theory criteria which consists of 6 indicators in assessing a policy evaluation so far it still needs to be improved. which includes several inhibiting factors such as: 1) Human resource development has not been maximized, 2) in terms of data unity that has not been well coordinated, 3) facilities and infrastructure have not been maximized. The efforts made in overcoming these inhibiting factors include: 1) Conducting training on human resources, 2) Carrying out repairs and developments related to data unity, 3) Improving facilities and infrastructure with the budget that has been provided. **The conclusion** of this research is that the smart city program in Cirebon Regency has been running for approximately 3 years, many programs have been made by the Cirebon Regency Government for this smart city program, but there are still many things that need to be improved both in terms of infrastructure, budget, and infrastructure. its human resources.

Keywords: Policy Evaluation, Public Service, Smart City

ABSTRAK

Latar belakang Penelitian ini berdasarkan masih banyaknya kekurangan pada program Smart City ini seperti masih kurangnya sarana dan prasarana kemudian kurangnya sumberdaya manusia sebagai pengoprasi program tersebut dan masih kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program ini akibat Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana evaluasi dari kebijakan program Smart City yang sudah dijalankan di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. **Metode** penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil** penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan program

Smart City sudah terlaksana dengan cukup baik, namun dalam kriteria teori Evaluasi yang terdiri dari 6 indikator dalam menilai suatu evaluasi kebijakan sejauh ini masih perlu ditingkatkan yang meliputi beberapa faktor penghambat seperti: 1) Belum maksimalnya pengembangan sumber daya manusia, 2) segi kesatuan data yang belum terkoordinasi dengan baik, 3) sarana dan prasana yang belum maksimal. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut antara lain: 1) Melakukan Pelatihan terhadap sumber daya manusia, 2) Melakukan perbaikan dan pengembangan terkait kesatuan data, 3) Meningkatkan sarana dan prasana dengan anggaran yang sudah disediakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah program smart city di Kabupaten Cirebon sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, banyak program yang sudah di buat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk program smart city ini, namun masih perlu banyak yang di perbaiki baik dari segi sarana prasarana, anggaran, maupun sumber daya manusianya.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Pelayanan Publik, Smart City

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini pemerintah dituntut untuk lebih inovasi dalam pengembangan kinerja agar tidak ketinggalan zaman. Berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi dan informasi membuat tantangan bagi pemerintah untuk membuat wajah baru dalam kancah pemerintahan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini mempunyai peran dalam penerapan E-Governance di Indonesia sendiri, guna mewujudkan pemerintahan berbasis digital kemudian pemerintah pusat membuat program dengan merangkul pemerintahan daerah untuk bersinergi membangun Indonesia yang lebih maju.

Program yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan Smart City (Kota Cerdas) di beberapa daerah. Dimana beberapa daerah di Indonesia sudah mulai menerapkan walaupun belum sepenuhnya. Konsep Smart City sendiri mempunyai peranan penting dalam pemerintahan, dengan adanya konsep Smart City diharapkan kota dapat memberikan pelayanan dengan memanfaatkan serta mengolah teknologi yang berkembang pada saat ini serta membangun infrastruktur cerdas berbasis teknologi dan juga memberikan pelayanan yang efektif serta efisien kepada masyarakat yang ada di kotanya.

Smart City sebuah konsep kota yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan pemerintah kepada warga masyarakat. Konsep ini demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengintegrasikan beberapa elemen yang ada di kota seperti pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi. Di Indonesia sudah berkembang konsep di beberapa kota seperti Bandung, Denpasar, Jakarta, Makassar, dengan harapan dapat mewujudkan kota kota di Indonesia yang maju dan bisa memanfaatkan teknologi dengan semestinya. Di Jawa Barat selain Kota Bandung yang menerapkan konsep Smart City ada beberapa kota/kabupaten yang menerapkan konsep ini, salah satunya adalah Kabupaten Cirebon.

Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon sejak tahun 2018 terus mengembangkan layanan smart city dalam menjalankan pemerintah daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Cirebon yaitu Terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, maju dan aman. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon terus berupaya dalam mengembangkan konsep Smart City guna mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis teknologi, sesuai dengan Peraturan

Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada pasal 4 yang berbunyi:

“ Tujuan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah untuk mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi”.

Kabupaten Cirebon terpilih menjadi salah satu Kabupaten/Kota yang terpilih mengikuti Gerakan Menuju Smart City sebagai mana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Publik Indonesia Nomor B-309/KOMINFO/DJAI/AI05/05/2018 perihal penyampaian hasil seleksi Assesment : Gerakan Menuju Smart City. Selain termasuk dalam 100 daerah Smart City di tingkat nasional, salah satu dukungan program Smart City di Kabupaten Cirebon yaitu melalui RPJMD Tahun 2019-2024 pada misi ke 4 (empat) yaitu meningkatnya produktivitas masyarakat untuk menjadi lebih maju dan unggul. Konsep Smart City ini dijadikan sasaran misi tersebut, agar nantinya program Smart City menjadi prioritas unggulan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan kerjasama antar SKPD dalam mendukung serta menyukseskan Gerakan Smart City di Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan konsep Smart City ini.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Latar belakang permasalahan penelitian yang saya lakukan adalah Berdasarkan Prapenelitian yang dilakukan oleh penulis pelaksanaan konsep Smart City Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon banyak menemui masalah di antaranya belum optimalnya fasilitas teknologi informasi guna mendukung pelayanan kepada masyarakat serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep Smart City itu sendiri. Pada era pandemik saat ini anggaran pemerintah pun mengalami pengurangan dikarenakan anggaran negara digunakan untuk pembiayaan penanganan COVID-19, Dinas Komunikasi dan Informatika lembaga yang berperan dalam pengembangan program Smart City ini mengalami kendala dalam anggaran akibat pandemic COVID-19 sehingga terjadinya refocusing data. Di Kabupaten Cirebon juga belum tersedianya layanan 112 pengaduan masyarakat. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya dalam mengoptimalkan dalam pengembangan Smart City agar terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai Kabupaten Cerdas dan Hebat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Program Smart City oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cirebon.

1.3. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang pemberdayaan fakir miskin telah dilakukan oleh 3 peneliti yang dimana penelitian yang dilakukan Siti Widharetno Mursalim yaitu “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART CITY DI KOTA BANDUNG”, penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ratna Pramesti berjudul “EFISIENSI TERHADAP PENERAPAN SMART CITY DI KABUPATEN MALANG”, yang dimana dari 2 penelitian terdahulu ini terdapat perbedaan dan kesamaan yang dimiliki penelitian terdahulu dan penelitian sekarang pada beberapa aspek seperti metode dan objek penelitian serta teori penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan Siti Widharetno Mursalim (2017) dalam jurnal dengan judul

Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif deskriptif untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan smart city di Kota Bandung.

Penelitian yang dilakukan Dyah Ratna Pramesti (2019) dalam jurnal dengan judul Efisiensi Terhadap Penerapan Smart City di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif deskriptif untuk mengetahui efisensi program smart city ini serta dampak yang di berikan setelah menerapkan konsep smart city di Kabupaten Malang.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri menggunakan jenis penelitiannya kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif bertujuan untuk memahami serta mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan program smart city dan langkah langkah apa saja yang diambil oleh pemerintahan Kabupaten Cirebon khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika guna mewujudkan serta mengembangkan Kabupaten Cirebon dalam konsep Smart City.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang digunakan sebelumnya untuk mendapatkan bahan ataupun materi perbandingan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian penulis sekarang. Berikut dalam kajian pustaka meletakkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya :

1. Hasil penelitian Siti Widharetno Mursalim yaitu “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART CITY DI KOTA BANDUNG” hasil penelitian ini mengatakan bahwa Implementasi kebijakan smart city di Kota Bandung belum tersosialisasikan dengan baik terutama kepada SKPD sehingga masyarakat Kota Bandung banyak yang belum mengetahui hal tersebut,masih belum optimalnya dalam Sumber Daya manusia dalam pemahaman dalam mengelola smart city.
2. Hasil penelitian yang dilakukan Dyah Ratna Pramesti berjudul ”EFISIENSI TERHADAP PENERAPAN SMART CITY DI KABUPATEN MALANG” hasil penelitian mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten dalam penerapan smart city sangat tepat dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah, kemudian dampak dari smartcity membawa dampak yang baik dalam mengelola pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi.

1.5. Tujuan.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk memahami serta mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan program Smart City di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami selama penerapan kebijakan Smart City di Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan pada program Smart City di Kabupaten Cirebon .

II. METODE

Bapak dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan teori evaluasi

oleh William N. Dunn. Ada beberapa dimensi dalam teori evaluasi yaitu dimensi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsifitas, dan Ketepatan. Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tema penelitian. Diantaranya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Transaksional Elektronik, Instruksi Presiden Republik nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peraturan Bupati Cirebon no 85 tahun 2020 tentang Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon.

Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti lapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama analisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Evaluasi Kebijakan Program Smart City Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Cirebon

Program Smart City merupakan program yang dijalankan di Kabupaten Cirebon guna meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini Evaluasi Kebijakan Program Smart City Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Cirebon adalah teori evaluasi menurut William N. Dunn yang terdiri atas 6 (enam) variabel didalamnya yaitu sebagai berikut:

3.1.1 Efektivitas

Terpenuhinya sasaran dan tujuan ditetapkannya kebijakan program Smart City di Kabupaten Cirebon merupakan cita cita yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penerapan program Smart City ini. Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya semaksimal mungkin dalam penerapan program Smart City di berbagai komponen pemerintahan guna memaksimalkan pelayan kepada masyarakat agar lebih efektif dan lebih efisien.

Smart city merupakan program yang di lakukan di pemerintahan Kabupaten Cirebon guna mengembangkan dan meningkatkan sistem pelayanan kepada masyarakat. Smart City ini adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang merupakan penyelenggaraan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan E-Government yang didalamnya terdapat program Smart City. Dalam upaya mewujudkan tujuan dari Smart City ini ada program program yang dibentuk guna mempermudah jalannya program tersebut. Terpenuhinya sasaran pada indikator ini adalah program smart city ini sudah berjalan dengan baik namun masih perlu di tingkatkan.

3.1.2 Efisiensi

Dapat disimpulkan bahwa efisiensi ini merupakan kesiapan baik dari sarana maupun prasarana serta anggaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memaksimalkan dari segi sarana dan prasarannya, yaitu dengan peningkatan fasilitas dan perbaikan gedung/kantor serta peralatan yang rusak, penggantian dan pengadaan peralatan kantor, penambahan/ pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional lapangan baik kendaraan roda dua maupun road empat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas/kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekertaris Dinas Komuniaksi dan Informatika Kabupaten Cirebon Bapak Ade Nugroho Yuliarno, S.STP pada 7 Januari 2022 menyatakan bahwa:

Untuk sarana dan prasarana dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sudah berupaya meningkatkan dan memaksimalkan dari segi fasilitas yang tersedia guna menunjang semua kegiatan serta program yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika terkhususnya penunjang program Smart City itu sendiri, di Kabupaten Cirebon sudah tersedia diantaranya jaringan fiber optic dan radio wireless yang sudah tersebar di lingkup Pemerintahan Kabupaten Cirebon. Kemudian dari segi anggarannya sendiri selama masa pandemi COVID-19 sempat terhambat dikarenakan dana yang seharusnya diterima penuh itu terpotong karena digunakan untuk dana bantuan COVID-19, tetapi se iring berjalannya waktu hal tersebut sudah membaik dan ke depannya akan lebih baik lagi dari segi anggarannya agar semua program dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Berdasarkan hasil penelitian yang saya ambil dilapangan disimpulkan bahwa mengenai anggaran sempat terhambat, tetapi setelahnya sudah mulai membaik.

3.1.3 Kecukupan

Kecukupan yang ada dalam konteks kebijakan publik dapat diartikan bahwa tujuan kebijakan sudah berkembang dan sudah dapat di rasakan. Kecukupan juga dapat diartikan bahwa tujuan yang telah dicapai setelah pelaksanaan kebijakan tersebut dirasakan sudah dapat menyelesaikan masalah yang terdapat pada objek kebijakan tersebut.

William N. Dunn (2003) berpendapat bahwa Kecukupan berarti seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kecukupan memiliki hubungan dengan efektivitas yang memprediksi jauh tidaknya alternatif kebijakan yang ada, dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dapat disimpulkan bahwa sebelum suatu kebijakan itu dirumuskan harus dilakukan analisis masalah yang terjadi di tengah tengah masyarakat sebagai suatu sasaran yang akan dicapai, sehingga bisa dirumuskan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kebijakan Smart City di Kabupaten Cirebon dapat dikatakan efektif apabila sudah dapat

menyelesaikan masalah yang ada di Kabupaten Cirebon serta sudah sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan. Karena kebijakan program Smart City ini dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

3.1.4 Perataan

Kecukupan yang ada dalam konteks kebijakan publik dapat diartikan bahwa tujuan kebijakan sudah berkembang dan sudah dapat di rasakan. Kecukupan juga dapat diartikan bahwa tujuan yang telah dicapai setelah pelaksanaan kebijakan tersebut dirasakan sudah dapat menyelesaikan masalah yang terdapat pada objek kebijakan tersebut.

William N. Dunn (2003) berpendapat bahwa Kecukupan berarti seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kecukupan memiliki hubungan dengan efektivitas yang memprediksi jauh tidaknya alternatif kebijakan yang ada, dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dapat disimpulkan bahwa sebelum suatu kebijakan itu dirumuskan harus dilakukan analisis masalah yang terjadi di tengah tengah masyarakat sebagai suatu sasaran yang akan dicapai, sehingga bisa dirumuskan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kebijakan Smart City di Kabupaten Cirebon berdasarkan yang saya temui adalah sudah diterapkan di berbagai desa di Kabupaten Cirebon seperti dipasangnya jaringan wifi guna mempermudah akses internet di desa desa.

3.1.5 Responsivitas

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas yang mempunyai peran penting dalam proses pengembangan program smart city di Kabupaten Cirebon. Walaupun semua pihak pemerintahan yang ada di Kabupaten Cirebon juga mempunyai andil dalam proses kebijakan smart city, dalam proses pelaksanaannya sudah pasti banyak menemui hambatan serta tantangannya, dalam indeks keberhasilan suatu kebijakan dapat dinilai apakah suatu kebijakan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Cirebon setiap tahunnya dilakukan evaluasi guna memastikan pertumbuhan serta pengembangan program ini. Evaluasi ini kemudian menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan program ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Bapak Nanan Abdul Manan, S.STP M.Si pada 12 Januari 2022, menyatakan bahwa: "Program Smart City di Kabupaten terus kami kembangkan demi terwujudnya Kabupaten Cirebon yang lebih baik, kami terus melakukan evaluasi agar dapat melihat apa apa saja kekurangan serta hambatan yang kemudian kita berikan solusinya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik terus kami kembangkan demi pelayanan yang prima kepada masyarakat ada beberapa indeks yang menjadi bahan evaluasi program ini, kemudian nilai ini yang akan menjadi acuan untuk kemajuan program ini kedepannya."

Hasil dari indikator ini dapat saya simpulkan bahwa warga masyarakat Cirebon belum semuanya paham dan mengerti akan program ini jadi masih perlu dilakukannya sosialisasi terhadap pengenalan program smart city ini.

3.1.6 Ketepatan

Kriteria evaluasi yang terakhir adalah ketepatan suatu kebijakan terhadap pemecahan masalah yang terjadi di tengah tengah masyarakat. Dalam hal ini ketepatan dalam kebijakan ini adalah bagaimana pelaksanaan pemerintahan yang terbuka sebagai wujud reformasi birokrasi.

Maksud dari reformasi birokrasi adalah pembaharuan atau perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.

Dalam hal ini ketepatan dalam kebijakan merupakan penilaian suatu tujuan dari sebuah kebijakan yang menjadi solusi dari masalah ditengah- tengah masyarakat sehingga bisa dilihat apakah dapat memecahkan masalah tersebut atau justru menimbulkan masalah yang lain. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baru dan lebih baik dari sebelumnya, semakin berkembang zaman semakin bertambah pula permasalahan yang ada.

Kabupaten Cirebon terpilih sebagai 100 kota penggerak program smart city karena dinilai mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkup Kabupaten Cirebon. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu elemen dari berkembangnya program ini, berdasarkan observasi penullis di lapangan pada saat melaksanakan magang Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon bekerja sama dalam pengembangan program Smart City ini.

Program smart city ini sudah tepat diterapkan di Kabupaten Cirebon karena sudah banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan adanya program smart city ini seperti pada pemasaran produk UMKM di media internet pada era pandemi ini, akan tetapi masih perlu dikembangkan dan di perbaiki lagi.

3.2 Upaya

Beberapa upaya harus dilakukan guna meningkatkan kualitas Program Smart City di Kabupaten Cirebon, beberapa upaya yang dilakukan ialah memberikan pelatihan serta sosialisasi kepada Sumber Daya Manusia agar mereka mendapatkan wawasan lebih mengenai Teknologi Informasi, pembuatan SOP dalam pelaksanaan pelayanan digital, pembangunan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan Smart City, Pengembangan sistem informasi pelayanan publik, pembangunan aplikasi dan dashboard Smart City dan pembangunan sistem yang terintegrasi.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Program smart city merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon guna menindaklanjuti program tersebut. Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon bersama sama membuat beberapa program guna menyelesaikan beberapa masalah yang ada.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon membuat beberapa program guna menyelesaikan permasalahan di lingkup Pemerintahan Cirebon. Di Kabupaten Cirebon sendiri mempunyai permasalahan yang kompleks baik dari bidang perdagangan, perekonomian, kemudia masih banyak lagi. Hal yang dilakukan adalah membuat program program dengan memanfaatkan teknologi yang ada di era globalisasi ini.

Pada era pandemi perekonomian Kabupaten Cirebon mengalami penurunan akibat dibatasinya pergerakan masyarakat, kemudian pemerintah Kabupaten Cirebon membuat program dengan berbasis teknologi yakni dengan memanfaatkan media elektronik guna melakukan pemasaran kepada halayak umum dan guna menarik minat masyarakat.

Dibalik program yang sudah di jalankan masih banyak masyarakat Kabupaten Cirebon yang belum mengetahui apa itu smart city dan masih banyak warga kabupaten cirebon yang belum bisa mengoprasikan nya.

Pemerintah Kabupaten Cirebon terus melakukan pengembangan terhadap program program smart city ini guna menjadikan Kabupaten Cirebon yang lebih maju dan mampu bersaing dengan kota kota yang termasuk dalam kota yang menerapkan program smart city.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di lokasi magang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon terkait Evaluasi Kebijakan Program Smart City oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melalui hasil wawancara dan data- data yang di peroleh selama penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Evaluasi Kebijakan Program Smart City oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon masih belum bisa dikatakan optimal dalam pelaksanaannya dapat dilihat melalui teori Evaluasi menurut Willam N. Dunn (2003) bahwa dalam mengukur evaluasi kebijakan program smart city di Kabupaten Cirebon ini menyoroti : efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan, dimana masih banyak hambatan serta kekurangan yang dialami dan sangat perlu untuk ditindaklanjuti.

2. Faktor penghambat pada pelaksanaan Kebijakan program Smart City diantaranya adalah Masih belum maksimal sumber daya manusia yang menguasai bidang Teknologi Informasi, belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang program Smart City, dan kesatuan jaringan, sistem aplikasi yang belum sempurna.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika beserta Pemerintahan Kabupaten Cirebon dalam mengatasi hambatan hambatan yang terjadi pada proses kebijakan program smart city adalah memberikan pelatihan kepada beberapa sumber daya manusia yang sengaja dibentuk untuk mengoperasikan sistem ini agar mereka mempunyai wawasan serta pengetahuan tambahan dalam mengelola aplikasi maupun jaringan terkait program smart city ini, meningkatkan mutu dan pelayanan dengan cara memperbaharui sarana dan prasarana yang ada.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan penelitian. Penelitian ini juga dilakukan pada satu opd saja sebagai model studi kasus dipilih berdasarkan pendapat Willam N.Dunn

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya pada lokasi yang sama berkaitan dengan program smart city di kabupaten cirebon guna menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Dua.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Transaksional Elektronik

Instruksi Presiden Republik nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
Peraturan Bupati Cirebon no 85 tahun 2020 tentang Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon.

